

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Menurut Todaro dan Smith penduduk berperan sebagai pemacu pembangunan karena populasi yang lebih besar sebenarnya adalah pasar potensial yang menjadi sumber permintaan akan berbagai macam barang dan jasa yang kemudian akan menggerakkan berbagai macam kegiatan ekonomi sehingga dapat menciptakan skala ekonomi dalam produksi yang akan menguntungkan semua pihak, menurunkan biaya produksi dan menciptakan sumber pasokan atau penawaran tenaga kerja murah dalam jumlah yang memadai sehingga akan dapat merangsang meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berarti kemiskinan akan menurun (Kumalasari, 2011).

Indeks pembangunan manusia diperkenalkan sebagai ukuran untuk mengevaluasi tingkat perkembangan manusia di suatu daerah yang dihitung dengan membandingkan harapan hidup, pendidikan, dan standar kehidupan. Sebagaimana informasi dari BPS, pembangunan manusia ialah proses dari pilihan masyarakat yang berkembang. Pada dasarnya manusia memiliki pilihan yang cukup beragam, hal ini juga dapat mengalami perubahan seiring berjalan waktu. Meskipun begitu, dalam setiap fase konstruksi, terdapat tiga pilihan paling dasar yakni hidup yang panjang dan sehat, memperoleh pengetahuan dari pendidikan, serta mempunyai akses untuk memperoleh berbagai sumber kebutuhan sebagai tujuan mendapatkan kehidupan yang layak. Jika tidak memiliki ketiga dasar tersebut, maka juga tidak ada akses untuk ke pilihan yang lainnya (Hartanto et al., 2019).

Ada empat landasan penting dalam Indeks Pembangunan Manusia, landasan tersebut ialah harapan hidup rata-rata, tingkat melek huruf, rata-rata tahun belajar, dan

kemampuan ekonomi. Usaha untuk meningkatkan IPM di suatu wilayah biasanya difokuskan pada empat aspek tersebut, namun diketahui bahwa meningkatkan masing-masing aspek untuk meningkatkan IPM bukanlah tugas yang sederhana. Karena itu, pemerintah harus memfokuskan kebijakan yang dapat berdampak pada kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tersebut.

**Tabel 1.1 Indeks Pembangunan Manusia di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022**

<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>2022</b>
Kulonprogo	75,46
Bantul	75,46
Gunungkidul	75,46
Sleman	75,46
Yogyakarta	87,69

*Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024*

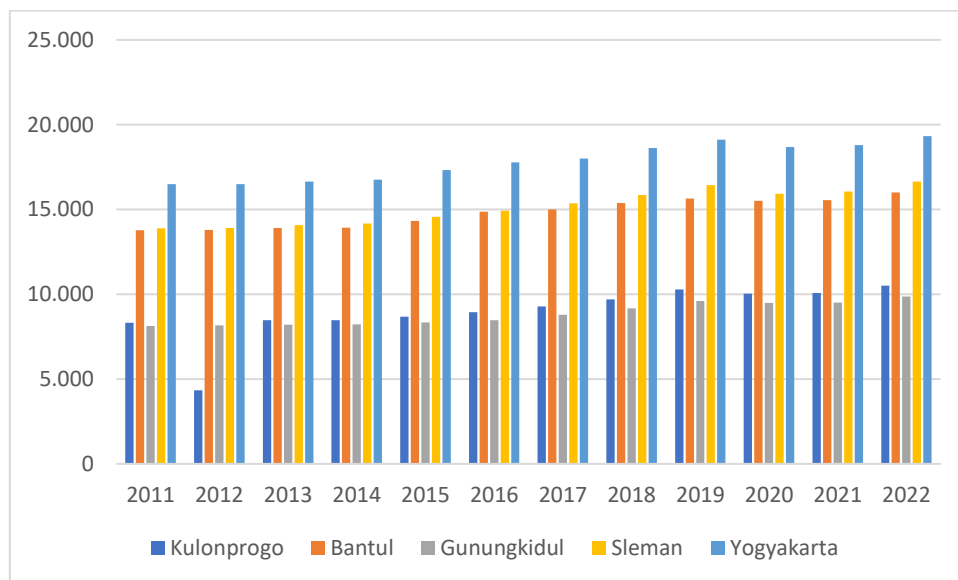
Berdasarkan tabel 1.1 pada tahun 2022 rata-rata indeks pembangunan manusia di Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami peningkatan yang sama dan stabil di Kabupaten Kulonprogo, Bantul, Gunungkidul, dan Sleman dengan nilai sebesar 75,46%. Namun, Kota Yogyakarta memiliki indeks Pembangunan manusia yang cukup tinggi sebesar 87,69%.

Tercapainya tujuan pembangunan manusia yang dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pemerintah memiliki peran dalam Pembangunan manusia yaitu dengan cara melalui pengeluaran pemerintah sektor publik yaitu pada anggaran di bidang kesehatan untuk dapat meningkatkan angka harapan hidup maupun untuk menurunkan angka kematian. Pada bidang pendidikan dapat digunakan untuk meningkatkan akses masyarakat pada pendidikan yang baik dan murah, sehingga dapat

meningkatkan angka melek huruf. Kemudian pada pengeluaran pemerintah seperti belanja modal yang dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur untuk bisa meningkatkan pendapatan rill perkapita (Baeti, 2013).

Dalam hal ini indeks Pembangunan manusia menjadi salah satu tolak ukur yang dapat dibilang cukup penting untuk mengukur berhasil atau tidaknya terhadap Pembangunan kualitas hidup manusia untuk para penduduk ataupun masyarakat. Jika angka indeks Pembangunan manusia tinggi dapat dikatakan bahwa kesejahteraan masyarakat juga tinggi, dapat dilihat dari hasil pemerintah yang telah berhasil dalam menjalankan Pembangunan yang ada serta upaya dalam peningkatan kesejahteraan penduduk yang tercapai. Oleh sebab itu, indeks Pembangunan manusia mampu menetapkan peringkat atau level Pembangunan pada suatu wilayah (Juliarini, 2018).

**Gambar 1.1 Jumlah Penduduk di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011-2022**

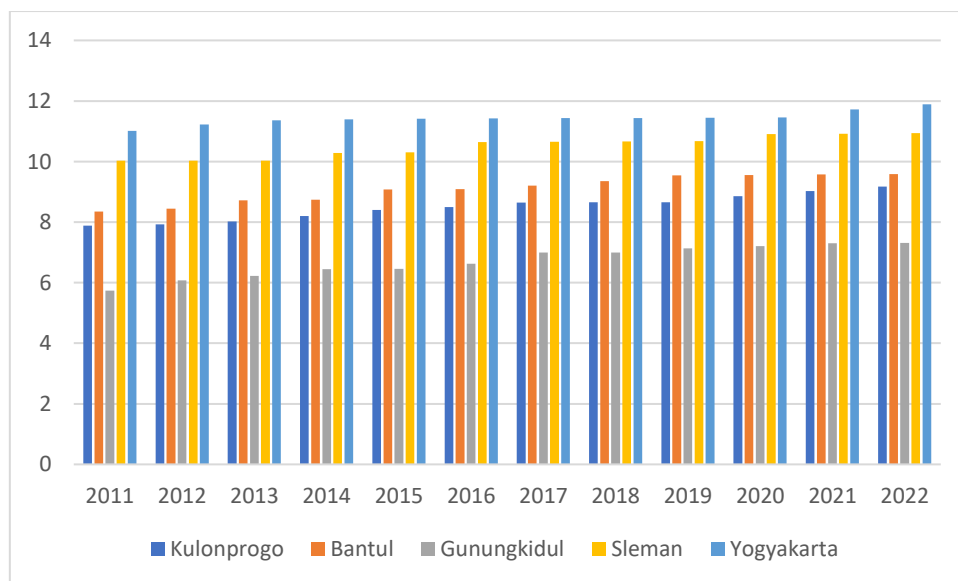


Berdasarkan gambar 1.2 pada tahun 2011-2022 rata-rata nilai jumlah penduduk mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Dari 5 kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta yang paling tinggi rata-rata jumlah penduduknya ada di kota Yogyakarta, kemudian rata-rata jumlah penduduk yang paling rendah ada di Kabupaten

Gunungkidul. Hal ini terjadi karena di Kota Yogyakarta memiliki tempat yang strategis maka masyarakat lebih mempunyai keinginan untuk bertempat tinggal di Kota Yogyakarta daripada di Kabupaten Gunungkidul.

Permasalahan penambahan jumlah penduduk tidak hanya terkait dengan banyaknya saja, namun juga memberikan dampak pada pembangunan dan kesejahteraan seluruh umat manusia. Dalam konteks progress pembangunan, perspektif terhadap masyarakat terpecah menjadi dua, Sebagian menganggap mereka sebagai hambatan bagi kemajuan dan sebagian lagi menganggap mereka sebagai penggerak pembangunan. Penduduk berperan sebagai penggerak pembangunan terjadi karena adanya jumlah penduduk yang besar, adanya potensi pasar, serta kebutuhan akan berbagai produk dan jasa yang tersedia. Ini akan mendorong aktivitas ekonomi yang beragam dan menghasilkan efisiensi dalam produksi yang menghasilkan manfaat untuk semua orang, mengurangi pengeluaran produksi, serta memberikan pekerjaan dengan biaya yang terjangkau dan cukup. Dampaknya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan tingkat kemiskinan (Zakaria, 2018).

**Gambar 1.2 Pengeluaran Perkapita di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011-2022**



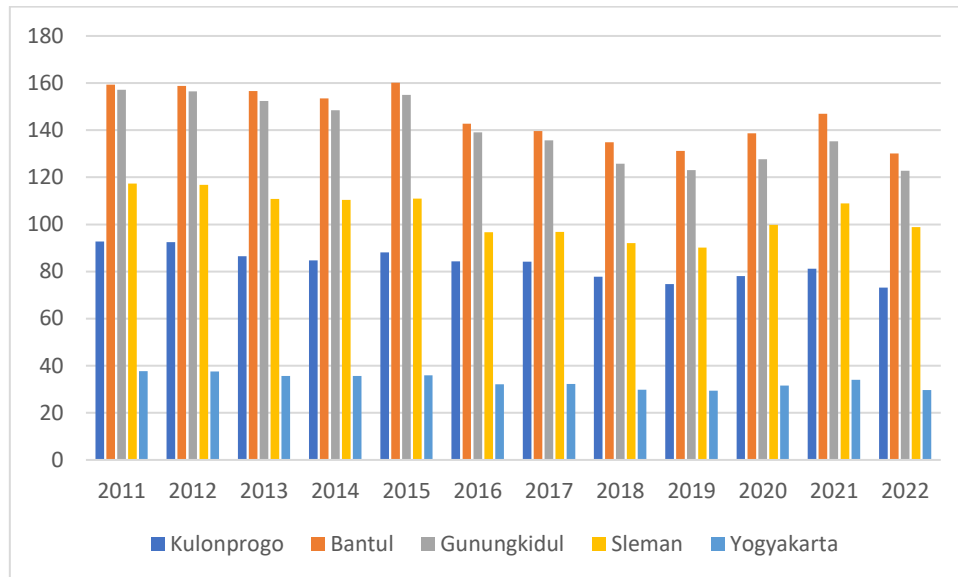
Berdasarkan gambar 1.3 pada tahun 2011-2022 pengeluaran perkapita di Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami peningkatan yang stabil pada setiap tahunnya. Kemudian pada 5 kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki pengeluaran perkapita paling rendah terdapat di Kabupaten Gunungkidul dan yang memiliki pengeluaran perkapita tertinggi terdapat di Kota Yogyakarta. Hal ini dikarenakan Kota Yogyakarta adalah kota pelajar yang termasuk daerah yang banyak dikelilingi masyarakat yang masih berstatus sebagai pelajar ataupun mahasiswa.

Selanjutnya untuk melihat tingkat mutu hidup manusia ada pada standar hidup layak yang dapat digambarkan oleh Pengeluaran Perkapita yang disesuaikan. Sumber daya manusia yang melimpah namun belum memaksimalkan potensi yang ada juga menyebabkan pendapatan per kapita yang kurang memadai untuk dibidang cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari dari segi pengeluaran per kapita Indonesia masih terbilang rendah, sehingga daya konsumsi per kapita rumah tangga pun kurang terpenuhi dengan cukup. Selain dimensi-dimensi Rata-Rata Lama Sekolah dan Pengeluaran per Kapita, terdapat dimensi ataupun indicator lain yang dapat memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia.

Menurut Muhamad Abdul Halim, mendefinisikan pengeluaran per kapita secara keseluruhan bagi anggota rumah tangga yang termasuk dalam satu rumah tangga yaitu dengan memakai pengertian pengeluaran konsumsi rumah tangga. Jadi, Pengeluaran konsumsi rumah tangga yaitu pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga untuk membel barang-barang dan jasa-jasa kebutuhan hidup sehari-hari bagi anggota rumah tangga dalam suatu periode tertentu. Penghasilan rumah tangga atau uang masuk itu sebagian besar dibelanjakan lagi, yaitu untuk membeli segala hal yang diperlukan untuk hidup. Dalam ilmu ekonomi dikatakan: dibelanjakan untuk konsumsi. Konsumsi tidak

hanya mengenai makanan saja, tetapi mencakup semua pemakaian barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup (Muhammad Abdul Halim,2012).

**Gambar 1.3 Rata-rata Lama Sekolah di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011-2022**



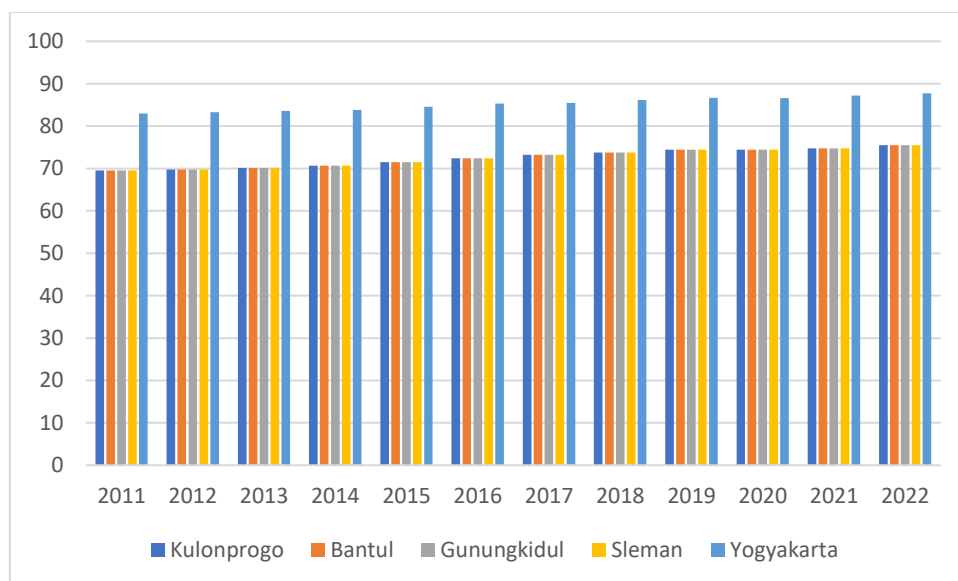
Berdasarkan gambar 1.4 pada tahun 2011-2022 rata-rata lama sekolah di Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki peningkatan yang stabil pada tahun 2011-2015, namun pada tahun selanjutnya di 2016-2022 memiliki ketidakstabilan pada lanju rata-rata lama sekolah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini dikarenakan terjadinya covid-19 pada tahun 2019 mengakibatkan rata-rata lama sekolah menurun dan setelah tahun 2019 mengalami peningkatan Kembali.

Rata-rata lama sekolah disebut sebagai suatu investasi yang dapat diambil dampaknya pada masa depan. Landasan atau modal dasar Pembangunan ekonomi dan Pembangunan nasional adalah pendidikan. Alokasi belanja yang pemerintah sediakan harus dialokasikan ke sektor pendidikan untuk membangun infrastruktur dan fasilitas pendidikan sehingga pemerintah dapat berinvestasi dalam pengembangan sumber daya manusia. Pengetahuan, keterampilan, kompetensi, dan ide dalam membentuk modal

manusia merupakan investasi yang paling efektif dalam membuat manusia menjadi produktif (Todaro Smith, 2011).

Pendidikan juga sebagai unsur penting dalam pembangunan manusia karena memiliki peran penting dalam meningkatkan kemampuan suatu wilayah dalam menyerap teknologi modern dan pengembangan kapasitas pembangunan berkelanjutan. Pendidikan dalam pembangunan manusia dapat dilihat dengan rata-rata lama sekolah. Pendidikan yang lebih tinggi akan lebih besar harapannya dalam membangun manusia dari pada pendidikan yang lebih rendah, ketika kesempatan kerja terbatas bagi pendidikan yang lebih rendah orang-orang akan memposisikan dirinya untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi.

**Gambar 1.4 Tingkat Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011-2022**



Berdasarkan gambar 1.5 tahun 2011-2022 tingkat kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki peningkatan yang stabil disetiap tahunnya. Namun, dari 5 kabupaten/kota Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki tingkat kemiskinan tertinggi berada di Kota Yogyakarta. Hal ini dikarenakan banyaknya penduduk yang

dimana ada berbagai kondisi kehidupan yang serba kekurangan dalam memenuhi kebutuhan minimumnya sehingga tidak merasakan hidup yang layak.

Secara ekonomi, tingkat kemiskinan merupakan kondisi yang terus menerus berulang secara bertahap mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dalam proses Pembangunan manusia, khususnya tahapan kondisi masyarakat tertinggi dan kekurangan modal manusia seperti pendidikan, kesehatan, maupun keterampilan, kemudian tahapan produktivitas rendah, tahapan pembentuk modal rendah, tahapan pendapatan riil rendah, tahapan penghematan rendah, dan tahap pembentukan modal kecil (Arsyad, 2016).

Pembangunan manusia di Indonesia adalah identik dengan pengurangan kemiskinan. Investasi dibidang pendidikan dan kesehatan akan lebih berarti bagi penduduk miskin dibandingkan penduduk tidak miskin, karena aset utama penduduk miskin adalah tenaga kasar mereka. Tersedianya fasilitas pendidikan dan kesehatan murah akan sangat membantu untuk meningkatkan produktivitas, dan pada gilirannya meningkatkan pendapatan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembangunan manusia belum secara optimal dilakukan karena hanya berfokus pada pengurangan kemiskinan. Perkembangan penduduk miskin di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami penurunan namun jumlah penduduk miskin di Indonesia masih butuh untuk diperhatikan lagi demikian pembangunan manusia dapat lebih stabil. Kemiskinan dapat menjadikan efek yang cukup serius bagi pembangunan manusia karena masalah kemiskinan merupakan sebuah masalah yang kompleks yang sebenarnya bermula dari kemampuan daya beli masyarakat yang tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan pokok sehingga kebutuhan yang lain seperti pendidikan dan kesehatan pun terabaikan. Hal tersebut menjadikan gap pembangunan manusia di antara keduanya pun menjadi



besar dan pada akhirnya target capaian IPM yang ditentukan oleh pemerintah menjadi tidak terealisasi dengan baik (Nugroho dkk., 2022).

Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian pada kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan pada latar belakang permasalahan di atas., secara administratif terbagi menjadi lima bagian kabupaten diantaranya Kulonprogo, Bantul, Gunungkidul, Sleman dan Yogyakarta, dengan banyaknya jumlah kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tentunya akan memberikan gambaran bagi peneliti mengenai pembangunan manusia yang bervariasi dalam satu provinsi. Hal ini menjadi penting untuk mendukung dan sekaligus memberikan arah patokan bagian perencanaan dan pelaksanaan khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta dan pembangunan nasional pada umumnya. Adanya faktor pendukung IPM seperti ditopang dalam jumlah penduduk, pengeluaran perkapita, rata-rata lama sekolah dan Tingkat kemiskinan yang dapat ditinjau dalam penelitian ini yang mampu memberikan pengaruhnya terhadap pembangunan manusia yang ada didalamnya, terlebih khusus di kabupaten/kota Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah disebutkan, maka dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

- 1) Apakah Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2011-2022?
- 2) Apakah Pengeluaran Perkapita berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2011-2022?
- 3) Apakah Rata-Rata Lama Sekolah berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2011-2022?

- 4) Apakah Tingkat Kemiskinan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2011-2022?

### **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan pertimbangan luasnya cakupan masalah dan terbatasnya kemampuan membahas batasan masalah agar penelitian dapat terfokus dan tidak terlalu luas. Penelitian ini membatasi masalah tentang Pengaruh Jumlah Penduduk, Pengeluaran Perkapita, Rata-Rata Lama Sekolah, dan Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011-2022.

### **1.2 C. Tujuan Penelitian**

- 1) Menganalisis seberapa besar pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Daerah Istimewa Yogyakarta?
- 2) Menganalisis seberapa besar pengaruh Pengeluaran Perkapita terhadap Indeks Pembangunan manusia di Daerah Istimewa Yogyakarta?
- 3) Menganalisis seberapa besar pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Daerah Istimewa Yogyakarta?
- 4) Menganalisis seberapa besar pengaruh Tingkat Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Daerah Istimewa Yogyakarta?

### **1.3 D. Manfaat Penelitian**

1. Dapat memberikan informasi bagi Pemerintah Pusat maupun Daerah dalam hal penyusunan kebijakan di bidang perekonomian ataupun keuangan daerah di masa yang akan datang.
2. Untuk mengetahui factor-faktor Tingkat Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Bagi masyarakat atau pembaca, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan informasi mengenai apakah Jumlah Penduduk, Pengeluaran Perkapita, Rata-Rata Lama Sekolah dan Tingkat Kemiskinan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Daerah Istimewa Yogyakarta.